

Komitmen Perwujudan *Green Budgeting* sebagai kebijakan Fiskal yang Preservasi lingkungan

Siti Asih Utami

Program Studi Hukum Universitas Tidar

Abstract

Indonesia, as a developing country, faces numerous challenges, one of which is environmental damage, and its causes are not solely due to a single factor. To mitigate the worsening environmental damage, a pro-environment policy is needed. This study aims to analyze the commitment to Green Budgeting in Central Java Province and the main obstacles and challenges faced in implementing Green Budgeting principles. This study uses a Conceptual Approach, a legal research method based on the views, doctrines, and principles developed in legal science. The results show that the commitment to Green Budgeting in Central Java Province is demonstrated by the potential for Green Investment and the Central Java Provincial Government's plan to provide tax incentives for industrial areas and companies implementing green industry and renewable energy. This is reinforced by Central Java Governor Regulation Number 26 of 2025 concerning the Implementation of Green Industry Facilitation. The main obstacles and challenges faced in implementing Green Budgeting principles include technical aspects, institutional capacity, and cross-sectoral coordination.

Keywords: *Green Budgeting, Fiscal Policy, Environmentally Friendly*

Abstrak

Sebagai negara berkembang Indonesia mempunyai berbagai permasalahan salah satunya Kerusakan lingkungan dan penyebabnya tidak karena satu hal saja. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang semakin parah diperlukan suatu kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis komitmen Perwujudan *Green Budgeting* di Provinsi Jawa Tengah serta apa saja kendala dan tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip *Green Budgeting*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) metode dalam penelitian hukum yang berpijak pada pandangan, doktrin, dan asas-asas yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Perwujudan *Green Budgeting* di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan potensi Investasi Hijau dan rencana pemberian insentif pajak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan industri dan perusahaan, yang menerapkan industri hijau dan energi baru terbarukan. Diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Industri Hijau. Kendala dan tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip *Green Budgeting* diantaranya dari sisi teknis ialah kapasitas kelembagaan, hingga aspek koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: *Penganggaran Hijau, Kebijakan Fiskal, Ramah Lingkungan*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang didominasi perairan dan gugusan pulau dan mempunyai lebih dari 17.000 pulau memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. sensitivitas ini diperparah Cincin api Pasifik dan posisi geografis di wilayah tropis yang membuatnya rawan terhadap bencana hidrometeorologi dan geologi.¹

selain diperburuk oleh posisi geografis ada pula campur tangan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan membuat Kerusakan lingkungan di Indonesia menjadi permasalahan yang sangat serius dan penyebabnya tidak karena satu hal saja. Beberapa alasan kerusakan lingkungan yang muncul diantaranya deforestasi, pencemaran air dan udara, serta penambangan liar. Masalah ini memicu krisis ekologis yang mengancam kehidupan manusia dan alam

Namun tidak hanya di Indonesia hampir di semua negara juga mengalami Persoalan lingkungan, terutama negara berkembang. Pemanasan global sempat menjadi berita dan Isu lingkungan yang mendunia. Masalah pemanasan global tentu tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi terkait dengan banyak hal, misalnya kontaminasi udara akibat polutan yang tinggi dari negara-negara industri.²

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan fiskal yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sebagai contoh, Swedia telah mengintegrasikan SDGs dalam anggaran mereka dengan memastikan bahwa alokasi anggaran didasarkan pada kontribusi terhadap tujuan SDGs, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan inklusi sosial. Selain itu, Swedia juga menerapkan kebijakan Green Bonds, yaitu penerbitan obligasi hijau yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan efisiensi energi.³

Dari perbandingan mengenai negara yang menerapkan kebijakan fiskal ramah lingkungan tersebut tujuan artikel ini dibuat adalah untuk mengetahui Bagaimana komitmen Perwujudan *Green Budgeting* di Provinsi Jawa Tengah dan juga untuk mengetahui Bagaimana kendala dan tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip *Green Budgeting*

¹ Muhammad Nasuha Sofiyan, "DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN EKONOMI," *CENTRAL PUBLISHER* 2, no. 12 (2024): 2884–90, <http://centralpublisher.co.id>.

² Mondry, "Isu-Isu Lingkungan," 2023, <https://sdgs.ub.ac.id/isu-isu-lingkungan/>.

³ Badiul Hadi, "Implementasi APBN Berkelanjutan Di Indonesia: Studi Konseptual Dan Empiris," *Economic Reviews Journal* 3, no. 4 (2024): 1949–60, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.591>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu metode pemecahan masalah atau analisis yang berlandaskan pada pandangan, doktrin, dan pemikiran para ahli yang berkembang di dalam suatu bidang ilmu khususnya ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan asas, konsep, dan prinsip hukum baru saat aturan tertulis belum secara khusus mengatur suatu permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang tidak hanya dapat dijelaskan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian

1. Bagaimana komitmen Perwujudan *Green Budgeting* di Provinsi Jawa Tengah?

Green Budgeting atau apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia Penganggaran Hijau, merupakan salah satu tujuan *SDGs* atau *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). *SDGs* ini dilaksanakan secara global dan makro lebih jelasnya *SDGs* merupakan suatu susunan yang telah direncanakan dan juga dilaksanakan dengan komitmen para pemimpin bangsa, termasuk pemimpin Indonesia. Adapun tujuan dari *SDGs* yakni untuk menjaga lingkungan, meminimalisir ketimpangan, serta menumpas kemiskinan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki potensi untuk mengubah Indonesia menjadi negara berkembang yang dapat berkembang di segala bidang dan dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan secara tepat Sasaran.⁴

“*Green Budgeting refers to the use of budgetary policy-making tools to better understand environmental impact of spending choices, and ensure public budgets are aligned with climate and environmental objective.*”. dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa program Penganggaran hijau dibuat untuk ditujukan pada penerapan instrumen pembuatan kebijakan anggaran supaya lebih memahami dampak lingkungan yang timbul dari pilihan pengeluaran, dan memastikan anggaran publik dipergunakan selaras dengan tujuan iklim dan lingkungan.⁵

penganggaran hijau, menjadi elemen penting kebijakan publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa

⁴ Fajar Puja Pangestu et al., “Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *SDGs* (Sustainable Development Goals) 2030,” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 3 (2021): 210–19.

⁵ OECD, “Green Budgeting,” n.d., <https://www.oecd.org/en/topics/green-budgeting.html>.

Keuangan, mulai mengintegrasikan prinsip kepatutan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional untuk menjawab tantangan kepatutan dan perubahan iklim. Dalam green accounting, pelibatan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan mengenai prioritas iklim dan lingkungan hidup yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun anggaran. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses rincian anggaran, termasuk alokasi yang ditujukan untuk mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan.⁶

Penerapan *Green Budgeting* di Indonesia telah mulai dikembangkan melalui berbagai kebijakan dan instrumen fiskal. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Climate Budget Tagging (CBT), yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan anggaran yang berkaitan dengan perubahan iklim. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat mengetahui kontribusi anggaran terhadap kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.⁷ *Green Budgeting* dapat menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri hijau. Melalui anggaran yang berwawasan lingkungan, pemerintah bisa memberikan fasilitas, insentif, atau pendanaan bagi perusahaan yang ingin bertransformasi menuju industri hijau.

Melalui pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam acara Jateng Green Industrial Summit 2026 yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana memberikan insentif pajak untuk kawasan industri dan perusahaan, yang menerapkan industri hijau dan energi baru terbarukan. Merupakan suatu komitmen untuk memulai perwujudan *Green Budgeting*. Lebih lanjut lagi Pemprov Jateng juga menyatakan industri hijau sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Secara implementatif, regulasi itu diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Industri Hijau.⁸ melalui komitmen tersebut upaya perwujudan *Green Budgeting* diharapkan mampu mendorong transformasi industri hijau. Dengan gabungan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, kawasan industri, perguruan tinggi, lembaga pembiayaan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem industri hijau yang lebih kuat dan memahami dampak lingkungan.

⁶ Cici Nurdianti, Anggela Desisca, and Intan Putri Suryati, "GREEN BUDGETING : STRATEGI PERENCANAAN KEUANGAN BERBASIS SUSTAINABILITY : STUDI SLR," *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 2, no. 4 (2025): 484–95.

⁷ Astrid Cintya Putri and Mia Rosmiati, "PENERAPAN GREEN BUDGETING DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (STUDI PADA DLHK DIY)," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13, no. 6 (2026): 91–99.

⁸ "Genjot Industri Hijau, Pemprov Jateng Siapkan Insentif Pajak Bagi Perusahaan Ramah Lingkungan," 2026, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11495.

Perwujudan *Green Budgeting* di Provinsi Jawa Tengah juga ditunjukkan dari potensi Investasi Hijau. dalam mendukung investasi hijau unsur sumber daya alam, infrastruktur, dan regulasi yang telah ditetapkan menjadi acuan. kajian antar kriteria kebijakan menunjukkan bahwa prioritas utama untuk elaborasi investasi hijau di Provinsi Jawa Tengah adalah pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif. Dengan bobot tertinggi 0,298 kebijakan ini menekankan pentingnya penyediaan insentif, perizinan, subsidi untuk menarik investor ke sektor ramah lingkungan. Analisis lebih lanjut terhadap alternatif kebijakan pada masing-masing tolok ukur guna mengidentifikasi kebutuhan akan data transparan, kolaborasi lintas sektor dan penguatan regulasi sebagai faktor penting yang menjaga ekosistem Investasi Hijau yang berkelanjutan.⁹

2. Bagaimana kendala dan tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip *Green Budgeting*?

Komitmen pelaksanaan *Green Budgeting* di Jawa Tengah melalui berbagai kebijakan seperti industri hijau dan investasi hijau tetap tidak luput dari adanya suatu kendala dan tantangan. Karena sebagai suatu kebijakan fiskal pasti akan memunculkan kesenjangan antara perencanaan ideal dan realitas di lapangan. Penerapan Kebijakan pada tingkat daerah sering kali menghadapi hambatan yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan di tingkat pusat. Salah satu hambatan utama adalah masalah hubungan koordinasi antar organisasi, perwujudan kebijakan tentunya melibatkan berbagai lembaga dengan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Hubungan Koordinasi yang lemah mengakibatkan ketidaksepakatan antara pelaksana kebijakan, dan pelaksanaan yang tidak efisien. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, menjadi kendala signifikan dalam implementasi kebijakan di daerah.¹⁰

Penerapan penganggaran hijau di berbagai negara menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi teknis, kapasitas kelembagaan, hingga aspek koordinasi lintas sektor. Beberapa negara melakukan reformasi sistem penganggaran, namun belum seluruhnya berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan fiskal secara menyeluruh. Ketimpangan penerapan antarnegara juga menunjukkan perlunya analisis

⁹ Avi Budi Setiawan et al., “Perencanaan Investasi Hijau Pada Usaha Menengah Besar Di Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* Volume 25, no. 2 (2025): 217–30, <https://doi.org/10.7454/jepi.v25i2.1860>.

¹⁰ Vera Finidia Indah et al., “TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, no. 1 (2024): 99–118.

kontekstual yang lebih dalam mengenai bagaimana *Green Budgeting* dapat diadopsi secara efektif dalam kerangka kebijakan nasional.¹¹

Di tingkat daerah, pemerintah belum sepenuhnya memahami pengertian secara menyeluruh penganggaran hijau. Selain itu, dalam implementasinya Kurangnya komitmen dari pemerintah menyebabkan anggaran untuk Pengelolaan lingkungan bukan menjadi hal yang prioritas. Sehingga, anggaran pemerintah untuk Pengelolaan lingkungan menjadi sangat terbatas. Sebagai tambahan adapun masalah yang diajukan oleh pihak kementerian yaitu adanya kemungkinan perbedaan tujuan antara kementerian satu dengan yang lain. Karena setiap kementerian pasti memiliki agenda tersendiri yang belum tentu bertujuan mengurangi emisi karbon.¹²

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian tentang Komitmen perwujudan *Green Budgeting* sebagai kebijakan Fiskal yang Preservasi lingkungan dapat ditarik kesimpulan: (1) komitmen Perwujudan *Green Budgeting* di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan potensi Investasi Hijau dan rencana pemberian insentif pajak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan industri dan perusahaan, yang menerapkan industri hijau dan energi baru terbarukan. Diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Industri Hijau. (2) kendala dan tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip *Green Budgeting* diantaranya dari sisi teknis ialah kapasitas kelembagaan, hingga aspek koordinasi lintas sektor. Dalam implementasinya pemerintah belum sepenuhnya memahami pengertian secara menyeluruh penganggaran hijau selain itu terdapat masalah perbedaan tujuan yang mana belum tentu semua elemen pemerintah mau mengurangi emisi karbon. Penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian empiris agar memperoleh data yang lebih mendalam dan valid terkait perwujudan *Green Budgeting* di Provinsi Jawa Tengah.

¹¹ Suharyono, "Penerapan Green Budgeting : Strategi Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 9 (2025): 195–203, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16478638> Penerapan.

¹² LPEM FEB UI, "Mengungkap Permasalahan Stakeholder Pada Implementasi Penganggaran Hijau," 2016.

Daftar pustaka

- “Genjot Industri Hijau, Pemprov Jateng Siapkan Insentif Pajak Bagi Perusahaan Ramah Lingkungan,” 2026. https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11495.
- Hadi, Badiul. “Implementasi APBN Berkelanjutan Di Indonesia: Studi Konseptual Dan Empiris.” *Economic Reviews Journal* 3, no. 4 (2024): 1949–60. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.591>.
- Indah, Vera Finidia, Siti Zubaidah, Delfiazi Puji Lestari, Ade Uswatun, Hasanah, Feni Huspita Sari, Emilda Sinar Fatiha, and Basron. “TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, no. 1 (2024): 99–118.
- LPEM FEB UI. “Mengungkap Permasalahan Stakeholder Pada Implementasi Penganggaran Hijau,” 2016.
- Mondry. “Isu-Isu Lingkungan,” 2023. <https://sdgs.ub.ac.id/isu-isu-lingkungan/>.
- Nurdianti, Cici, Anggela Desisca, and Intan Putri Suryati. “GREEN BUDGETING : STRATEGI PERENCANAAN KEUANGAN BERBASIS SUSTAINABILITY : STUDI SLR.” *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 2, no. 4 (2025): 484–95.
- OECD. “Green Budgeting,” n.d. <https://www.oecd.org/en/topics/green-budgeting.html>.
- Pangestu, Fajar Puja, Nadia Shelvia Rahmadiani, Nike Tanzila Hardiyanti, and Ermita Yusida. “Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030.” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 3 (2021): 210–19.
- Putri, Astrid Cintya, and Mia Rosmiati. “PENERAPAN GREEN BUDGETING DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (STUDI PADA DLHK DIY).” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13, no. 6 (2026): 91–99.
- Setiawan, Avi Budi, Maulida Dewi Pangestika, Putri Patria Kusuma, and Mochammad Yusuf. “Perencanaan Investasi Hijau Pada Usaha Menengah Besar Di Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia Volume* 25, no. 2 (2025): 217–30. <https://doi.org/10.7454/jepi.v25i2.1860>.
- Sofiyan, Muhammad Nasuha. “DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP

LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN EKONOMI.” *CENTRAL PUBLISHER* 2, no. 12 (2024): 2884–90. <http://centralpublisher.co.id>.

Suharyono. “Penerapan Green Budgeting : Strategi Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 9 (2025): 195–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16478638> Penerapan.